

## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Laut Sulu merupakan jalur yang dilalui kapal-kapal niaga besar untuk menuju Samudera Pasifik. Dengan luas 100.000m<sup>2</sup>, wilayah perairan Sulu dikelilingi oleh daratan Indonesia (Sulawesi), Malaysia (Sabah) dan Filipina (Kepulauan Sulu), maka ketiga negara ini berkewajiban untuk menjaga keamanan perairan tersebut dari ancaman-ancaman keamanan maritim, baik tradisional maupun non-tradisional. Banyak sekali terjadi ancaman keamanan di wilayah Laut Sulu, seperti peredaran narkoba ilegal yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dan penyelundupan senjata untuk aktivitas terorisme serta yang paling berdampak adalah perompakan. Serangan perompakan yang terjadi di Laut Sulu kemudian berubah secara dramatis pada kuartal pertama 2016. Laporan ReCAAP dan IMB menunjukkan bahwa modusnya bergeser dari mengambil kapal / kargo menjadi menyandera dan meminta tebusan uang dalam jumlah yang sangat tinggi.

Kasus perompakan dan penculikan tersebut disadari sebagai kasus multi-yuridiksi yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu negara saja, mengingat lokasinya bersinggungan dengan perbatasan tiga negara dan penyebaran ancamannya sudah mencapai level multinasional. Untuk itu, Indonesia memberikan inisiasi untuk mengadakan pertemuan dengan tujuan mencari kesepakatan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina guna menyelesaikan masalah tersebut secara bersama. Diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia tersebut kemudian mendapat respon baik dari Malaysia dan Filipina.

Diplomasi terwujud dalam bentuk pertemuan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan dari ketiga negara yang dilaksanakan di Yogyakarta pada Mei 2016 dan kemudian menghasilkan Deklarasi Bersama *Joint Declaration on Immediate Measure to Address Security Issues in the Maritime Areas of Common Concern among Indonesia, Malaysia and the Philippines*. Dengan empat poin kesepakatan kerjasama, yaitu: *Pertama*, adalah melakukan Patroli Terkoordinasi; *Kedua*, adalah memberikan bantuan segera bagi keselamatan orang dan kapal dalam keadaan bahaya

di wilayah maritim yang menjadi perhatian bersama.; *Ketiga*, pembentukan *National Focal Point* atau *Hotline* antara ketiga negara guna memfasilitasi berbagi informasi dan intelijen; Terakhir, memformulasikan *Standard Operational Procedure (SOP)*.

Kegiatan yang bertujuan untuk membangun rasa saling percaya antara ketiga negara itu telah memberikan hasil yang nyata dan memfokuskan tujuan kepada sebuah kasus/konflik dengan pandangan dan urgensi yang sama. Proses diplomasi pertahanan terus berlanjut, mulai dari *Joint Working Group* ke-1 pada Mei 2016 hingga ke-7 pada Agustus 2018. Pada JWG ke-3 tersebut, telah ditandatangani Kerangka Kerjasama (*Framework of Arrangement*) dengan judul “*Trilateral Cooperative Arrangement Indonesia-Malaysia-The Philippines on Immediate Measure to Address Security Issues in The Maritime Areas of Common Concern*” atau yang lebih sering disingkat dengan *Trilateral Cooperative Arrangement Indomalphi* (TCA Indomalphi). Dengan ditandatanganinya FoA tersebut, maka tahap diplomasi pertahanan yang telah dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Filipina ini telah naik satu tingkat tujuannya. Kini diplomasi yang dilakukan oleh ketiganya bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Kerjasama keamanan pun telah terbentuk secara formal dan teknis.

Terkait dengan implementasi TCA Indomalphi sebagaimana yang tercantum dalam FoA, penulis membahasnya dalam dua periodisasi berdasarkan waktu, yaitu Tahun Pertama dan Tahun Kedua. Periode Tahun Pertama, dimulai sejak pertemuan trilateral pertama yaitu pada Mei 2016 sampai dengan Juli 2017. Pada tahun pertama, kerjasama TCA Indomalphi didominasi oleh pertemuan-pertemuan dan belum banyak merealisasikan poin-poin kerjasama yang ada secara maksimal. Hal ini terjadi karena waktu banyak dihabiskan untuk proses perencanaan kerjasama sejak awal 2017 hingga Juli 2017. Namun setidaknya ketiga negara tersebut sudah menetapkan jalur pelayaran alternatif yang lebih aman untuk pelayaran niaga agar terhindar dari ancaman perompakan.

Kerjasama pertukaran informasi intelijen juga sudah mulai ditindak lanjuti dengan pembuatan *Maritime Commander Center (MCC)* di Bongau (Malaysia), Tawau (Filipina) dan Tarakan (Indonesia). Pertukaran informasi akan dilakukan dengan menggunakan saluran Radio, Surel, *Video Call*, telepon dan fax. Tentu saja, semua informasi yang disebar melalui MCC akan berbentuk sandi atau singkatan-

singkatan yang sudah disepakati sebelumnya. Selain untuk berbagi informasi itelijen, saluran radio juga bisa digunakan kapal-kapal untuk melaporkan bila ada ancaman yang terjadi di laut sehingga bisa segera ditindak oleh angkata bersenjata.

Patroli maritim yang menjadi poin utama dalam kerjasama tersebut akhirnya diluncurkan pada 19 Juni 2017, setelah lebih dari 1 tahun sejak pertemuan pertama dilakukan. Patroli maritime ini menggunakan sistem Patroli Terkoordinasi seperti yang pernah dilakukan dalam kerjasama *Malacca Strait Patrol*. Patroli ini dilakukan oleh satuan tugas khusus dan paling tidak dilaksanakan selama 20 hari dalam kurun waktu 1 tahun. Selama melakukan patroli tersebut, kapal ketiga negara harus selalu melaporkan dan menjalin komunikasi dengan ketiga MCC. Bila ada ancaman atau serangan perompakan, maka kapal-kapal tersebut baru diizinkan untuk memasuki wilayah kedaulatan negara lain. Namun bila tidak ada serangan, patroli tetap dilakukan di wilayah masing-masing.

Sedangkan selama periode Tahun Kedua yang dimulai sejak Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2018, kerjasama banyak dilakukan dengan kegiatan teknis baik yang bersifat lanjutan dari tahun pertama maupun yang baru ada di tahun kedua. Kegiatan teknis baru yang dilaksanakan pada tahun kedua adalah Latihan Bersama Trilateral. Latihan bersama tersebut merupakan sebuah ajang untuk melatih para pasukan untuk melakukan patroli, komunikasi MCC, pencegahan hingga penindakan. Skenario latihan dibuat semirip mungkin dengan kasus perompakan yang sebenarnya. Lokasi latihan juga dilakukan di sekitar wilayah Laut Sulu.

Kerjasama lainnya yang baru dilakukan pada tahun kedua adalah *Trilateral Air Patrol* (Patroli Udara Trilateral/TAP) yang diluncurkan pada 12 Oktober 2017. Patroli ini dilaksanakan sebagai pelengkap dari TMP agar lebih efektif melalui pengawasan udara dan pengiriman personel tambahan melalui jalur udara bilamana dibutuhkan. Kegiatan lainnya yang dilakukan dibawah kerangka TCA Indomalphi ini adalah *Port Visit*. Hal ini dilakukan agar koordinasi dan kepercayaan antara ketiga negara menjadi semakin kuat demi menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Laut Sulu.

Upaya Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menekan ancaman di wilayah Laut Sulu memberikan dampak yang nyata terhadap stabilitas keamanan regional. Hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan kasus perompakan yang terjadi di Laut Sulu

sejak 2016 hingga 2018. *January-December Annual Piracy and Armed Robbery Ship in Asia 2017* oleh ReCAAP menyebutkan bahwa pada tahun 2017, terjadi penurunan angka laporan perompakan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 dilaporkan terjadi 13 insiden perompakan dan penculikan di Laut Sulu. Angka tersebut menurun pada 2017 menjadi hanya ada 3 insiden perompakan dan penculikan yang dilaporkan pada ReCAAP. Angka kasus perompakan dan penculikan menjadi terus menurun dengan hanya menjadi 2 insiden saja. Namun salah satunya berhasil dicegah, sehingga hanya ada 1 insiden perompakan dan penculikan yang terjadi. Keberhasilan ini dapat menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia, Malaysia dan Filipina karena telah sukses menanggulangi ancaman keamanan di Laut Sulu.

Setelah menemukan fakta bahwa kerjasama TCA Indomalphi ini memberikan dampak positif dalam upaya pengamanan Laut Sulu dalam 2 tahun pelaksanaannya, maka penulis berharap bahwa penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai apa saja yang telah dilakukan ketiga negara tersebut dalam menjaga stabilitas keamanan nasional dan keamanan kawasan Asia Tenggara. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian mengenai TCA Indomalphi ini masih sangat terbatas. Sehingga dengan adanya penelitian ini, selain mengetahui fakta keberhasilan TCA Indomalphi, pembaca juga bisa mengetahui bahwa negara pasti akan terus berusaha mengamankan wilayah kedaulatannya termasuk menjaga keamanan dan kenyamanan warganegaranya.

Melalui penelitian ini juga pembaca dapat mengetahui, bahwa meskipun dalam kondisi tidak perang, tentara tetaplah dibutuhkan dan tetap memiliki tugas operasinya masing-masing karena saat ini ancaman bisa datang dari mana saja. Bukan hanya mengenai tugas lapangan saja, tapi melalui penelitian ini bisa dilihat partisipasi tentara dalam berdiplomasi dan memperjuangkan kepentingan nasional secara nyata. Dalam dunia akademik, informasi-informasi tersebut tentu dibutuhkan terutama sebagai referensi dari materi yang akan disampaikan dalam sebuah tulisan atau presentasi.

## **6.2 Saran**

Saran penulis untuk pemerintah terutama Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pertahanan RI adalah untuk terus meningkatkan dan mempertahankan kerjasama TCA Indomalphi tersebut. Hal ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri

karena meskipun baru dilaksanakan pada 2 tahun, namun kerjasama tersebut sudah bisa memberikan dampak yang positif dan berhasil menekan angka ancaman perompakan dan penculikan di wilayah Laut Sulu. Peningkatan kualitas personel, peningkatan kecanggihan alutsista dan pemeliharaan alat komunikasi pada MCC juga harus menjadi perhatian khusus karena hal tersebut adalah penunjang utama dalam kerjasama TCA Indomalphi ini.

Sedangkan saran penulis untuk penelitian selanjutnya cukup banyak karena penulis merasa masih banyak sekali kekurangan dalam penelitian ini. Seperti keterbatasan waktu penelitian dan periode pelaksanaan kerjasama yang masih belum terlalu panjang. Penulis menyusun penelitian ini di awal pembentukan kerjasama hingga pada 2 tahun pertama pelaksanaannya. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk dilakukan beberapa tahun kedepan sehingga data yang bisa disajikan menjadi lebih banyak lagi. Idealnya mungkin bisa dilakukan selama 5 tahun sejak kerjasama dimulai, atau hingga melewati pergantian pemimpin khususnya Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Karena saat pergantian pemimpin, bisa saja pandangan akan urgensi terhadap suatu kasus berbeda. Sehingga itu akan menjadi sangat penting untuk diteliti.

Selain itu, hasil simpulan juga bisa saja berbeda. Jika di 2 tahun pertama ini kerjasama TCA Indomalphi ini berhasil, belum tentu kedepannya juga akan berhasil. Beberapa variabel pendukung kerjasama seperti fasilitas atau personel bisa saja menurun kualitasnya bila tidak diimbangi dengan pemeliharaan dan pelatihan secara berkala. Pertumbuhan dan penyebaran kelompok terorisme yang semakin banyak dan beragam juga bisa menjadi salah satu faktor yang mungkin saja juga akan bermain peran di wilayah Laut Sulu selain kelompok Abu Sayyaf. Kondisi nasional, regional dan internasional yang sangat fluktuatif membuat kerjasama ini bisa saja melahirkan hal-hal baru sebagai inisiatif lanjutan agar lebih efektif.

Pertemuan trilateral yang sering dilakukan dalam sela-sela pertemuan multilateral juga memunculkan adanya ketertarikan bagi negara lain untuk ikut berpartisipasi dalam TCA Indomalphi tersebut karena memiliki kepentingan dan urgensi yang sama dalam hal kontraterorisme. Namun sikap Indonesia dan Malaysia yang masih menutup kesempatan negara luar regional untuk berpartisipasi dalam kerjasama tersebut menjadi sebuah kontradiktif. Hal tersebut kemudian bisa menjadi

ide untuk diteliti lebih lanjut. Mengapa Indonesia dan Malaysia menutup kesempatan yang pada kenyataannya bisa saja mempermudah perlawanan dan menambah kapabilitas kekuatan dalam melawan kelompok terorisme. Bilamana suatu saat ternyata ada negara luar regional yang ikut serta dalam kerjasama kontra terorisme tersebut, hal itu juga bisa diteliti. Mengapa pada akhirnya Indonesia dan Malaysia memberikan kesempatan padahal sejak awal telah bersikap sangat tertutup.

Kekurangan lainnya yang dimiliki oleh penelitian ini adalah penulis yang tidak berkesempatan untuk meneliti keefektivannya secara rigid atau formal. Keefektivan dalam penelitian ini hanya diukur dari penurunan jumlah ancaman saja. Sementara masih banyak parameter lain untuk mengukur keefektivan dari sebuah kerjasama. Seperti sudah seberapa jauh kerjasama tersebut mewakili kepentingan nasional suatu negara. Atau bagaimana keserasian antara perencanaan dengan realisasi atau implementasi dari kerjasama tersebut (apakah seluruh poin yang direncanakan telah dilaksanakan?), dan masih banyak parameter lainnya yang luput dari penelitian ini. Sehingga penulis berharap pada penelitian selanjutnya dapat meneliti mengenai keefektivan dari kerjasama Trilateral Cooperative Arrangement Indomalphi ini secara lebih formal dan komprehensif dengan menggunakan penelitian evaluatif.

